



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggai Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 17 Januari 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN
UNIT KERJA : SEKRETARIAT DAERAH

I. DATA PRIBADI

1. Nama : HANDRIJANTO
2. Jabatan : KEPALA BAGIAN
3. NHK : 732632

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 1.550.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 174 m²/52 m² di KAB / KOTA TUBAN, HASIL SENDIRI Rp. 550.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 255 m²/230 m² di KAB / KOTA TUBAN, WARISAN Rp. 1.000.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 282.750.000

1. MOTOR, HONDA ACF1L21B06AT Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 12.000.000
2. MOTOR, YAMAHA 5TL MIO/AL115S Tahun 2008, HASIL SENDIRI Rp. 3.500.000
3. MOTOR, HONDA D1B02NI2L2 AT Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 11.250.000
4. MOBIL, SUZUKI SPLASH GL A/T Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 103.000.000
5. MOBIL, MAZDA CX 7 2.3L HIGH A/T Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 130.000.000
6. MOTOR, YAMAHA FAZZIO Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 23.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 82.250.000

D. SURAT BERTHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 324.445.783

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 2.239.445.783



III. HUTANG

Rp. ---

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp.

2.239.445.783

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.